

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sekolah dasar memegang peranan sentral dalam membentuk karakter peserta didik, karena masa ini menjadi periode krusial di mana nilai moral dan sosial mulai tertanam melalui pengalaman belajar dan interaksi sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Amanat ini menegaskan bahwa tujuan pendidikan tidak semata-mata penguasaan konten akademik, melainkan juga pembentukan watak luhur yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Periode sekolah dasar dibarengi dengan kecenderungan siswa meniru perilaku guru dan teman sebaya, sesuai teori pembelajaran sosial Albert Bandura yang menyatakan bahwa individu belajar melalui observasi model dan meniru perilaku yang dipersepsikan positif dalam lingkungan mereka. Menurut Bandura (1977), pembelajaran sosial melibatkan tiga unsur utama: observasi terhadap perilaku model, proses kognitif untuk mengkodekan informasi, dan reproduksi motorik untuk meniru perilaku tersebut. Dengan

demikian, setiap kebiasaan yang diterapkan mulai dari salam pagi hingga gotong-royong membersihkan kelas berpotensi menjadi mekanisme pembentukan karakter melalui internalisasi nilai. Budaya positif, sebagaimana didefinisikan di lingkungan sekolah, meliputi kebiasaan saling menghormati, gotong-royong, toleransi, dan semangat pantang menyerah. Ketika siswa mengalami suasana yang positif dan suportif, motivasi intrinsik mereka tumbuh, termasuk semangat belajar, rasa ingin tahu, dan keberanian mengekspresikan ide (Lickona, 1991).

Gagasan Thomas Lickona tentang pendidikan karakter memberikan landasan teoretis penting bagi upaya pembentukan budaya positif di sekolah. Lickona memandang karakter sebagai gabungan tiga komponen utama, yaitu moral knowing (pengetahuan tentang yang baik), moral feeling (penghayatan dan komitmen terhadap nilai yang baik), dan moral action (kemauan dan kebiasaan melakukan yang baik). Menurutnya, sekolah perlu secara sengaja mengajarkan nilai-nilai moral, membangun suasana yang mendukung penghayatan nilai (melalui teladan, kebiasaan, dan tradisi sekolah), serta memberi banyak kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan nilai tersebut dalam tindakan nyata. Lickona juga menekankan bahwa pendidikan karakter yang efektif menuntut kerja sama erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, sehingga nilai yang ditanamkan di sekolah diperkuat di lingkungan rumah dan komunitas. Dalam konteks penelitian ini, budaya positif siswa dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari keberhasilan sekolah mengelola tiga dimensi karakter menurut Lickona secara terpadu.

Pentingnya budaya positif sekolah diperkuat oleh berbagai penelitian

empiris yang menunjukkan korelasi signifikan antara kualitas budaya sekolah dengan perkembangan karakter siswa. Penelitian yang dilakukan Wanti et al. (2024) menemukan bahwa budaya sekolah yang positif—ditandai dengan kerja sama, disiplin, dan pengakuan prestasi—secara signifikan berkontribusi pada pembentukan karakter siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang berada dalam lingkungan dengan budaya sekolah yang suportif cenderung menampilkan tingkat integritas, empati, dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Lingkungan yang penuh penghargaan dan dukungan emosional menciptakan rasa aman psikologis, sehingga siswa lebih terbuka menerima masukan, berkolaborasi, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif (National School Climate Center, 2024). Budaya positif juga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap sekolah, yang berdampak pada peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.

Budaya sekolah dan iklim sekolah positif merupakan dua konsep kunci yang menjelaskan bagaimana nilai, norma, dan kebiasaan kolektif di lingkungan sekolah memengaruhi perilaku dan perkembangan peserta didik. Budaya sekolah mencakup keyakinan bersama, tradisi, dan pola interaksi yang berkembang dari waktu ke waktu, sedangkan iklim sekolah lebih menekankan pada persepsi siswa dan guru tentang rasa aman, dukungan, dan keterhubungan di sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa budaya dan iklim sekolah yang ditandai oleh rasa saling menghormati, keadilan, dan dukungan emosional mampu mendorong keterlibatan siswa, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengurangi perilaku menyimpang seperti bullying dan konflik destruktif. Dengan demikian, pembentukan budaya positif bukan hanya isu

moral, tetapi juga strategi pedagogis yang berdampak langsung pada kualitas proses dan hasil belajar siswa.

Selain itu, teori motivasi dua faktor Frederick Herzberg menekankan bahwa kepuasan kerja (atau dalam konteks pendidikan, kepuasan mengajar dan belajar) dipengaruhi oleh dua dimensi terpisah: faktor hygiene dan faktor motivator. Herzberg, Mausner, dan Snyderman (1959) dalam karya seminal mereka *"The Motivation to Work"* menjelaskan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan dimensi yang terpisah dan bukan sekadar kebalikan dari satu sama lain. Sebagaimana dinyatakan dalam teorinya, *"job satisfaction and dissatisfaction are not direct opposites; rather, they exist on separate continua"* (Herzberg et al., 1959, p. 114). Faktor *hygiene* seperti kondisi fisik ruang kelas, kebijakan sekolah, dan keamanan berfungsi mencegah ketidakpuasan, tetapi tidak otomatis meningkatkan kepuasan. Sementara itu, faktor motivator seperti pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan berkembang merupakan kunci memacu semangat dan kinerja (baik bagi guru maupun siswa). Dengan menghadirkan penghargaan atas perilaku positif dan memberikan tanggung jawab sesuai kemampuan siswa, sekolah menstimulasi motivasi intrinsik yang mendorong karakter kemandirian, kepercayaan diri, dan rasa tanggung jawab.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam pembentukan budaya positif adalah pendekatan disiplin positif (*positive discipline*). Pendekatan ini memandang disiplin bukan sekadar pemberian hukuman, tetapi proses pendidikan yang membantu siswa mengembangkan pengendalian diri, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada orang lain. Penelitian menunjukkan

bahwa strategi disiplin positif—seperti penguatan perilaku baik, pertemuan kelas, dan interaksi empatik—berkaitan dengan peningkatan motivasi intrinsik, kemampuan regulasi diri, serta kualitas hubungan guru–siswa yang lebih hangat. Di tingkat kelas, penerapan disiplin positif terbukti mampu mengurangi perilaku bermasalah, meningkatkan rasa keadilan, dan memperkuat iklim belajar yang kondusif. Dalam konteks sekolah dasar, integrasi disiplin positif ke dalam kebijakan SRA dan program Komite Sekolah akan memperkuat pesan bahwa aturan dan konsekuensi bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membimbing siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkarakter.

Sekolah Ramah Anak (SRA) muncul sebagai kerangka kebijakan yang sangat relevan dalam membangun budaya positif. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, SRA adalah satuan pendidikan yang aman, bersih, inklusif, dan nyaman, serta menjamin hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi dari kekerasan maupun diskriminasi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014). Konsep SRA dirumuskan berdasarkan prinsip BARIISAN (Bersih, Asri, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Aman, dan Nyaman) yang diterapkan melalui kebijakan anti-bullying, penyediaan ruang terbuka hijau, dan mekanisme partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah. Dengan demikian, SRA tidak hanya menciptakan lingkungan fisik yang kondusif, tetapi juga menetapkan norma sosial yang mendukung penerapan nilai-nilai positif. Keterlibatan aktif siswa dalam merancang kegiatan dan membuat aturan kelas

memperkuat ikatan emosional mereka dengan sekolah, yang pada akhirnya menjadikan budaya positif sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas sekolah (UNESCO, 2007).

Model Sekolah Ramah Anak di Indonesia memiliki kemiripan yang kuat dengan kerangka *Child-Friendly Schools* yang dikembangkan UNICEF dan UNESCO. Model ini berpijak pada prinsip bahwa sekolah harus beroperasi demi kepentingan terbaik anak, menyediakan lingkungan yang aman, sehat, dan protektif, serta menghormati hak-hak anak dan suaranya. UNICEF menegaskan bahwa sekolah yang ramah anak harus inklusif, peka gender, menghargai martabat manusia, dan mendorong pemberdayaan pribadi peserta didik. Dengan kata lain, SRA bukan hanya meniadakan kekerasan dan diskriminasi, tetapi juga secara proaktif menciptakan suasana yang mendorong kepercayaan diri, partisipasi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Jika dihubungkan dengan teori Herzberg, dimensi proteksi dan keselamatan dapat dipahami sebagai pemenuhan faktor *hygiene*, sedangkan pemberdayaan, partisipasi, dan penghargaan terhadap suara anak berkaitan dengan faktor motivator yang mendorong keterlibatan positif siswa dalam budaya sekolah.

Pemerintah tidak hanya mengembangkan kerangka Sekolah Ramah Anak (SRA), tetapi juga menggagas Program Adiwiyata sebagai langkah strategis untuk membentuk sekolah yang berwawasan lingkungan dan menumbuhkan budaya peduli lingkungan di kalangan warga sekolah (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Program Adiwiyata yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

dirancang untuk menciptakan iklim sekolah yang memungkinkan proses pembelajaran sekaligus penyadaran mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga warga sekolah terdorong untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Program Adiwiyata dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu: (1) perumusan kebijakan sekolah yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, (2) pengintegrasian isu lingkungan dalam kurikulum dan proses pembelajaran, (3) penyelenggaraan kegiatan lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh warga sekolah, dan (4) pengelolaan sarana serta prasarana sekolah secara ramah lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, 2025). Pada jenjang sekolah dasar, pelaksanaan Program Adiwiyata terbukti berkontribusi terhadap pembentukan karakter peduli lingkungan melalui kombinasi kegiatan pembelajaran dan pembiasaan, yang tercermin dalam perilaku disiplin menjaga kebersihan, rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, serta keterlibatan siswa dalam berbagai aktivitas pelestarian lingkungan (Nurhasanah & Novaliyosi, 2024; Khasanah, Prasetyo, & Diyah, 2022). Dalam penelitian ini, Program Adiwiyata yang berjalan di SDN Gayam dan SDN Ranggeh diposisikan sebagai instrumen praktis yang menguatkan implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak, karena keduanya saling melengkapi: SRA menitikberatkan pada perlindungan hak anak, pencegahan kekerasan, dan ruang partisipasi bagi siswa, sedangkan Adiwiyata fokus pada pengembangan kepedulian lingkungan dan pembentukan karakter tanggung jawab terhadap alam (Syamsul, 2025). Oleh sebab itu, kolaborasi

antara SRA dan Adiwiyata berpotensi membentuk budaya positif yang utuh, yang tidak hanya mengakomodasi aspek sosial-emosional siswa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran ekologis yang berkelanjutan (Nurhasanah & Novaliyosi, 2024; Khasanah et al., 2022). Lebih lanjut, Komite Sekolah memiliki peran strategis dalam memelihara dan memperkuat budaya positif. Sebagai lembaga yang mewakili orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah, Komite Sekolah menjalankan empat fungsi utama yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yaitu: (1) fungsi *advisory* (pemberi pertimbangan), (2) fungsi *supporting* (pendukung program), (3) fungsi *controlling* (pengawas pelaksanaan), dan (4) fungsi mediator (mediator komunikasi antara sekolah dan masyarakat) (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Dengan fungsi *advisory*, komite bersama kepala sekolah dan guru merumuskan kebijakan karakter yang kontekstual. Sebagai pendukung, komite menyediakan sumber daya baik material maupun non-material untuk kegiatan penguatan budaya (Ariyanti, 2024). Dalam kapasitas *controlling*, komite mengevaluasi efektivitas program secara berkala, memastikan bahwa tujuan budaya positif tercapai. Terakhir, sebagai mediator, komite memfasilitasi dialog antara sekolah dan orang tua, memastikan kesinambungan penerapan nilai baik di lingkungan keluarga dan sekolah (Nisaa' & Rahayu, 2024).

Peran Komite Sekolah dalam pembentukan budaya positif juga dapat dianalisis melalui kerangka teori keterlibatan orang tua yang dikembangkan Joyce Epstein. Epstein mengklasifikasikan keterlibatan orang tua menjadi

enam bentuk, yaitu: (1) parenting, yakni bantuan sekolah kepada keluarga untuk menciptakan lingkungan rumah yang mendukung belajar; (2) communicating, yaitu komunikasi dua arah yang efektif antara sekolah dan rumah; (3) volunteering, berupa partisipasi orang tua sebagai relawan dalam kegiatan sekolah; (4) learning at home, yaitu dukungan orang tua terhadap kegiatan belajar di rumah; (5) decision making, berupa pelibatan orang tua dalam pengambilan keputusan sekolah; dan (6) collaborating with the community, yakni kerja sama sekolah dengan berbagai unsur masyarakat. Dalam kerangka ini, Komite Sekolah menjadi wadah formal yang mengorganisasi keenam bentuk keterlibatan tersebut, sehingga orang tua dan masyarakat tidak hanya hadir sebagai penyedia dana, tetapi juga mitra dalam pembinaan karakter dan budaya positif siswa.

Pendekatan komprehensif yang melibatkan Sekolah Ramah Anak dan Komite Sekolah menciptakan sinergi struktural dan budaya. Kebijakan SRA menetapkan kerangka formal dan fisik bagi terciptanya iklim positif, sementara Komite Sekolah mengawal pelaksanaan dan menjamin partisipasi *stakeholder* (Violeta & Lessy, 2024). Kolaborasi berbagai pihak di sekolah menjadi kunci agar penguatan budaya positif tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi tampak dalam kebiasaan nyata sehari-hari. Melalui pembiasaan kegiatan berlandaskan kearifan lokal—seperti gotong royong, tradisi keagamaan, dan kegiatan sosial—nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila semakin tertanam dalam diri siswa. Ketika kepala sekolah, guru, siswa, dan warga sekolah lainnya terlibat bersama, karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kepedulian, dan sikap religius berkembang lebih kuat dalam kehidupan

sekolah. (Rahmawati dkk., 2025).

Konsep partisipasi masyarakat dalam pendidikan menegaskan bahwa mutu dan relevansi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif keluarga dan komunitas. Rodriguez dan Villarreal menyatakan bahwa partisipasi komunitas dalam pendidikan bukan sekadar masalah “jumlah” keterlibatan, tetapi juga kualitas keterlibatan yang mencakup tanggung jawab bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Partisipasi yang bermakna menempatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra sejajar, bukan sekadar penerima informasi atau objek kebijakan sekolah. Dalam kerangka ini, Komite Sekolah dipandang sebagai mekanisme formal yang memfasilitasi akuntabilitas bersama (*shared accountability*) antara sekolah, keluarga, dan komunitas dalam mewujudkan budaya positif. Hal ini selaras dengan gagasan bahwa siswa, guru, dan orang tua seharusnya diposisikan sebagai subjek perubahan yang aktif, bukan sekadar penerima kebijakan.

Implementasi budaya positif juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan berilmu dan bertanggung jawab. Melalui pembiasaan nilai baik, siswa belajar mengekspresikan empati, menghargai perbedaan, serta bekerja sama dalam dinamika kelompok keterampilan esensial di era globalisasi. Lebih dari itu, budaya positif mendorong kreativitas dan inovasi; siswa yang merasa aman dan dihargai tidak takut melakukan eksperimen, mengemukakan ide baru, atau mengambil inisiatif, yang pada gilirannya memperkuat kompetensi abad 21 seperti *problem-solving* dan *critical thinking*.

Keberhasilan pembentukan budaya positif sekolah memerlukan komitmen jangka panjang dan proses berkelanjutan. Langkah konkret meliputi: pertama, pelatihan berkelanjutan bagi guru mengenai strategi *character education* dan teknik umpan balik positif; kedua, penyusunan kurikulum informal berupa kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan kerja sama, toleransi, dan kepemimpinan; ketiga, penghargaan formal (sertifikat, piagam) dan non-formal (pengakuan lisan, panggilan khusus) kepada siswa yang menunjukkan perilaku positif; keempat, evaluasi berkala melalui survei iklim sekolah dan diskusi kelompok terfokus untuk memetakan kekuatan dan area yang perlu diperbaiki; kelima, integrasi nilai-nilai positif ke dalam setiap aspek kehidupan sekolah mulai dari upacara bendera hingga kegiatan seni dan olahraga (Widyasneti & Supriyanto, 2023).

Dalam konteks SDN Ranggeh dan SDN Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, upaya integrasi budaya positif ini perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Misalnya, melibatkan kearifan lokal seperti nilai gotong-royong dalam kebiasaan membersihkan lingkungan sekolah, atau mengangkat cerita rakyat setempat untuk mengajarkan nilai keberanian dan kejujuran. Selain itu, penguatan peran orang tua dan tokoh masyarakat setempat, melalui forum Komite Sekolah, menjadi jembatan untuk meneruskan budaya positif di rumah dan masyarakat (Jumari, 2020).

Berdasarkan observasi awal dan komunikasi informal dengan guru serta pengurus Komite Sekolah di SDN Ranggeh dan SDN Gayam, masih ditemui beberapa tantangan dalam pembentukan budaya positif siswa. Beberapa siswa menunjukkan perilaku kurang disiplin, kurang peduli terhadap

kebersihan lingkungan sekolah, serta kecenderungan konflik ringan antar teman sebaya yang belum selalu diselesaikan melalui komunikasi konstruktif. Di sisi lain, program Sekolah Ramah Anak di kedua sekolah tersebut telah mulai diinisiasi, namun belum dioptimalkan dalam hal pelibatan siswa sebagai subjek aktif maupun keterpaduannya dengan peran strategis Komite Sekolah. Komite Sekolah dan paguyuban kelas cenderung lebih banyak berfokus pada dukungan sarana-prasarana dan kegiatan insidental, sementara fungsi *advisory* dan *controlling* yang berkaitan dengan penguatan budaya positif belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif Sekolah Ramah Anak dan praktik pembentukan budaya positif yang diharapkan di tingkat satuan pendidikan.

Secara akademik, sejumlah penelitian telah mengkaji implementasi Sekolah Ramah Anak dan peran Komite Sekolah secara terpisah. Penelitian tentang SRA umumnya menyoroti pemenuhan hak anak, penciptaan lingkungan aman, dan pencegahan kekerasan di sekolah, sementara kajian mengenai Komite Sekolah banyak berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan terhadap mutu layanan pendidikan. Namun, masih terbatas penelitian yang secara simultan mengkaji pengaruh Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan peran Komite Sekolah terhadap pembentukan budaya positif siswa, khususnya di jenjang sekolah dasar negeri di wilayah semi-perdesaan seperti Kecamatan Gondangwetan. Celah penelitian inilah yang menjadikan kajian ini memiliki nilai orisinalitas sekaligus urgensi, baik dari sisi teoretis maupun praktis.

Dengan demikian, penelitian mengenai “Pengaruh Kebijakan

Sekolah Ramah Anak dan Peran Komite Sekolah terhadap Pembentukan Budaya Positif Siswa di SDN Gayam dan SDN Ranggeh Kecamatan Gondangwetan” diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian tentang sinergi kebijakan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan budaya sekolah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kepala sekolah, guru, dan komite dalam merancang strategi kolaboratif yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk membangun budaya positif siswa. Selain itu, temuan penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi sekolah dasar lain yang memiliki karakteristik serupa untuk mereplikasi praktik baik yang teridentifikasi.

Dengan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat" sebagai pijakan normatif, didukung oleh teori pembelajaran sosial Bandura (1977) dan teori motivasi dua faktor Herzberg et al. (1959), serta kerangka Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang diatur dalam Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014 dan peran Komite Sekolah, peneliti memandang bahwa pembentukan budaya positif bukan sekadar pilihan strategis, tetapi keharusan moral dan hukum. Budaya positif akan menjadi perekat sosial yang menjaga keharmonisan dan meningkatkan kualitas hidup siswa secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada upaya memahami mekanisme implementasi budaya positif di SDN Ranggeh dan SDN Gayam, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan praktik yang dapat dipertanggungjawabkan agar hasilnya dapat direplikasi di berbagai konteks

sekolah dasar lain di Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

Menyelaraskan dengan judul penelitian “Pengaruh Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan Peran Komite Sekolah terhadap Pembentukan Budaya Positif Siswa di SDN Gayam dan SDN Ranggeh Kecamatan Gondangwetan” serta latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti membatasi fokus rumusan masalah pada:

1. Apakah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak terhadap pembentukan budaya positif siswa di SDN Ranggeh dan SDN Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan?
2. Apakah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara peran Komite Sekolah terhadap pembentukan budaya positif siswa di SDN Ranggeh dan SDN Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan?
3. Apakah terdapat pengaruh positif yang signifikan secara simultan antara pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan peran Komite Sekolah terhadap pembentukan budaya positif siswa di SDN Ranggeh dan SDN Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan?

1.3.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menguji pengaruh signifikan pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah

Anak terhadap pembentukan budaya positif siswa di SDN Ranggeh dan SDN Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

2. Menguji pengaruh signifikan peran Komite Sekolah terhadap pembentukan budaya positif siswa di SDN Ranggeh dan SDN Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.
3. Menguji pengaruh signifikan secara simultan antara pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan peran Komite Sekolah terhadap pembentukan budaya positif siswa di SDN Ranggeh dan SDN Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang “Pengaruh Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan Peran Komite Sekolah terhadap Pembentukan Budaya Positif Siswa di SDN Gayam dan SDN Ranggeh Kecamatan Gondangwetan” ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan, hasil penelitian dapat menjadi bahan acuan dalam merumuskan dan mengevaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak serta pemberdayaan Komite Sekolah untuk memperkuat budaya positif di tingkat satuan pendidikan.
2. Bagi Kepala Sekolah, temuan ini dapat dijadikan pedoman dalam menyusun rencana strategis dan operasional yang lebih responsif terhadap hak anak serta mendorong kolaborasi efektif dengan Komite Sekolah dalam membudayakan nilai-nilai positif.
3. Bagi Komite Sekolah, temuan penelitian ini diharapkan menjadi bahan

evaluasi dan penguatan peran Komite Sekolah, baik dalam fungsi *advisory*, *supporting*, *controlling*, maupun *mediator*. Melalui hasil penelitian, Komite Sekolah dan paguyuban kelas dapat mengetahui sejauh mana kiprah mereka telah mendukung kebijakan ramah anak dan pembentukan budaya positif, serta aspek-aspek mana yang perlu ditingkatkan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan pola kemitraan yang lebih efektif antara orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam membangun iklim dan budaya sekolah yang kondusif bagi tumbuh kembang siswa.

4. Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, penelitian ini diharapkan memotivasi peningkatan partisipasi dalam program ramah anak dan memfasilitasi pemahaman mengenai praktik pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai saling menghormati, kedisiplinan, dan kerja sama.
5. Bagi Siswa, pemahaman dan penerapan budaya positif diharapkan meningkatkan rasa aman, keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran, serta mendukung pengembangan karakter sesuai tujuan pendidikan nasional.
6. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan teoritis dan empiris untuk studi lanjut tentang efektivitas kebijakan ramah anak, peran lembaga sekolah, dan dinamika budaya sekolah di kontekstual yang berbeda.

1.5. Definisi Istilah

1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah kebijakan yang

dirumuskan dan diimplementasikan oleh satuan pendidikan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, melindungi siswa dari kekerasan dan diskriminasi, serta mendorong partisipasi anak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sekolah.

2. Peran Komite Sekolah adalah tugas dan fungsi yang dijalankan oleh lembaga independen beranggotakan orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, dan sekolah untuk memberi pertimbangan, dukungan sumber daya, pengawasan, dan mediasi antara sekolah dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pembentukan budaya positif.
3. Budaya positif sekolah adalah kumpulan nilai, norma, dan kebiasaan kolektif yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh warga sekolah (meliputi sikap saling menghormati, kejujuran, kedisiplinan, serta kerja sama) yang menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman, dan memotivasi pengembangan karakter siswa.
4. Pembentukan budaya positif siswa merujuk pada proses internalisasi nilai-nilai positif melalui kebijakan, praktik pembelajaran, dan partisipasi aktif warga sekolah, yang menghasilkan perubahan sikap dan perilaku siswa secara berkelanjutan.
5. SDN Gayam dan SDN Ranggeh adalah Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, yang menjadi lokasi penelitian untuk mengkaji pelaksanaan Kebijakan SRA dan dinamika peran Komite Sekolah dalam membentuk budaya positif siswa.